

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

a) Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III

Implementasi merupakan sebuah ide yang berhubungan dengan beberapa parameter kesuksesan atau dikenal dengan kemampuan dan pencapaian.¹ Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai suatu konsep yang bukan hanya bermakna berdasarkan susunan dua kata tersebut, implementasi kebijakan sebagai suatu ide mempunyai beberapa fondasi terutama berbagai faktor-faktor yang memiliki peranan penting dalam mekanisme pengaplikasian kebijakan.² Teori implementasi kebijakan yang dikatakan oleh George Edwards III dalam buku Jumroh dan Yoga menyebutkan ada empat variabel yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan publik, komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi antar perumus kebijakan dengan pelaksana di lapangan, serta antar implementator dengan *target group*. Hal ini berkaitan komunikasi mengenai makna dari sebuah program yang hendak diaplikasikan. Dalam mekanisme komunikasi kebijakan, terdapat tiga perihal yang harus dicatat pada komunikasi kebijakan, yaitu transmisi (*transmission*) berjalan dengan baik, kejelasan (*clarity*) materi komunikasi yakni kejelasan kebijakan dan rencana atau langkah-langkah kebijakan, oleh siapa, bagaimana, di mana, mengapa kebijakan itu perlu diimplementasikan, dan konsistensi (*consistency*) komunikasi implementasi kebijakan yang senantiasa sampai tujuan implementasi bisa tercapai. Hasil dari ketiga komunikasi kebijakan tersebut dalam susunan implementasi kebijakan mempunyai dampak besar pada kemampuan implementasi kebijakan. Sejauh mana ketiganya

¹ Jumroh and M Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik* (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), 81.

² Jumroh and Pratama, 118.

berdampak pada komunikasi kebijakan, bisa dijelaskan berikut ini:

a. *Transmission* (Penyampaian)

Penyampaian antara komunikator harus disusun dengan memanfaatkan metode komunikasi yang baik dan menyesuaikan kondisi, serta mengamati faktor-faktor kendala komunikasi yang apabila terjadi. Unsur unsur utama yang menjadi bagian penting dari transmisi dalam komunikasi adalah terdiri dari: *Pertama*, komunikator yang berfungsi sebagai pengambil keputusan kebijakan. Komunikator harus mempunyai berbagai syarat untuk melaksanakan komunikasi yakni keterampilan dalam mempengaruhi orang lain, mengetahui rancangan substansi kebijakan sebagai bab yang akan dikomunikasikan serta mempunyai kepercayaan diri. *Kedua*, penerima yakni penerima pesan atau informasi kebijakan. *Ketiga*, media. Banyak metode, cara dan saluran komunikasi, baik dengan lisan lewat pendekatan individual atau massa, ataupun dengan tertulis (poster, brosur, leaflet, selebaran), dan juga audio visual (film, TV, CD).

b. *Clarity* (Kejelasan)

Penyampaian informasi terkait kebijakan tidak tentu mewujudkan implementasi kebijakan dengan baik jika penyampaian informasinya tidak jelas. Ketidak jelasan informasi biasanya disebabkan informasinya masih bersifat global dan tidak menjelaskan tahapan implementasi kebijakan. Hasilnya implementator juga mengambil keputusan yang sifatnya global, sehingga implementasiannya menjadi kurang tepat. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan harus jelas supaya menciptakan hasil yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan.

Disparitas informasi dalam komunikasi kebijakan bisa juga dikarenakan standar informasi kebijakan yang baku tidak ada, komunikator yang sudah dibakukan kualifikasinya tidak ada, serta kreativitas dan imajinasi pelaksana bisa menjadi sebab fokus implementasi kebijakan menjadi bermacam-macam. Selain itu, hambatan kejelasan komunikasi disebabkan oleh pembuatan kebijakan

yang rumit, terdapat perlawanan dari publik, bertentangnya tujuan serta keperluan adanya konsensus, belum terbiasanya pada kebijakan baru, dan hakekat dari keputusan-keputusan pengadilan.

c. *Consistency* (Konsistensi)

Pentingnya konsistensi komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan adalah guna menjaga persepsi, mempertahankan sikap pelaksana pada kebijakan, dan meneguhkan arah implementasi, sehingga terwujudnya kinerja kebijakan yang diinginkan. Konsistensi disini merupakan adanya kesesuaian, keselarasan, dan kesinambungan tentang informasi yang diberikan.

2) Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi:

a. Jumlah dan kualitas staf

Dalam hal ini, yang dimaksud ialah jumlah staf yang memadai serta memiliki kemahiran dan keterampilan untuk mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi yang tepat dan relevan

Dalam hal ini, yang dimaksud yaitu adanya informasi yang terwujud dalam dua bentuk yakni langkah yang jelas atau kegiatan yang perlu dilakukan dan informasi dalam bentuk data yang berhubungan dengan pengimplementasian kebijakan.

c. Kewenangan

Hal ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh implementator guna melaksanakan kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas yang memadai baik anggaran maupun fasilitas kerja sangat mendukung untuk pelaksanaan kebijakan. Kapabilitas yang disediakan dari sumber-sumber di atas harus sebanding dengan tingkat masalah, jangkauan yang luas maupun capaian jumlah sasaran.

3) Disposisi

Variabel selanjutnya yang memiliki dalam keefektifan pengimplementasian kebijakan yaitu variabel disposisi. Maksudnya yaitu tentang perilaku dan sikap dari pelaksana, walaupun komunikasi sudah terwujud dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang

optimal, tapi jika sikap para pelaksana yang tidak mendukung maka pengimplementasian kebijakan tidak akan berhasil. Terdapat tiga variabel indikator dari disposisi, menurut Edwards III, yaitu sikap ego sektoral, penempatan staf birokrasi serta faktor pendorong yang diartikan sebagai motivasi bagi pelaksana kebijakan guna mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

Kesamaan sikap atau perspektif antara para pembuat kebijakan atau formulator kebijakan dengan para implementator kebijakan sangat diperlukan. Para implementator (birokrat) secara umum memiliki kemungkinan menyimpang dalam sikap dan perspektifnya terkait kebijakan, hal tersebut bisa menghambat keberhasilan pengaplikasian kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Variabel terakhir adalah variabel struktur birokrasi, dalam variabel ini Edwards III menggambarkan perspektif pembagian tugas dan prosedur melakukan tugas dengan menetapkan Prosedur Operasi Baku (*Standard Operating Procedure*). Struktur birokrasi berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dikarenakan:

- a. Menyertakan orang banyak, sehingga dibutuhkan upaya koordinasi dari berbagai tujuan para aktor yang kemungkinan berbeda.
- b. Mengubah tindakan guna menyesuaikan dengan model implementasi yang dibutuhkan.
- c. Agar sumber-sumber yang diaplikasikan bersifat efektif dan efisien.³

b) Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah salah satu tahap dalam mekanisme kebijakan publik. Implementasi biasanya dilakukan sesudah sebuah kebijakan disusun dengan sasaran yang gamblang. Implementasi merupakan sebuah susunan aktivitas rangka membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan.⁴ Implementasi merupakan suatu komponen penting untuk menciptakan suatu

³ Jumroh and Pratama, 123–30.

⁴ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 25.

ide. Seseorang atau pelaku pemerintahan perlu mengimplementasikan sebuah ide guna mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan.⁵

Kebijakan adalah cara atau prinsip beraksi yang diambil guna mengambil keputusan. Setiap pembentukan kebijakan publik dimulai dengan perumusan masalah yang sudah diketahui selanjutnya implementasi kebijakan tersebut diarahkan guna guna menanggulangi permasalahan yang ada dalam masyarakat.⁶ Kebijakan adalah upaya dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan serta sebagai bentuk dalam mengatasi masalah dengan memanfaatkan fasilitas tertentu serta dalam waktu yang sudah ditentukan. Suatu kebijakan sifatnya mendasar, hal tersebut disebabkan kebijakan bisa dijadikan landasan dalam pencapaian tujuan.⁷

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan dalam melakukan sebuah kebijakan yang sudah ditentukan. Implementasi kebijakan berperan penting terhadap jalannya mekanisme pemerintahan dan kemakmuran masyarakat.⁸ Kesuksesan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dalamnya pengetahuan tentang bagaimana berbagai komponen dapat sama-sama bekerja secara harmonis yang dilihat dari hubungan antara aktor, keterampilan pelaksana di lapangan, strategi dalam menyampaikan informasi atau sosialisasi, dan kapabilitas organisasi.⁹ Implementasi kebijakan membutuhkan para pelaksana yang bisa dipercaya, ahli dalam bidangnya, mempunyai komitmen untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengamati petunjuk dari peraturan pemerintah yang resmi.¹⁰

⁵ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), 119.

⁶ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), 2.

⁷ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 84, <https://doi.org/10.29210/3003906000>.

⁸ Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, 120.

⁹ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2013), 11.

¹⁰ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 3.

c) **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

1. Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi pendorong dalam menilai kesuksesan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel-variabel itu bukan hanya berdiri sendiri-sendiri, melainkan bisa saja saling berhubungan satu sama lain. Penjelasan variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a) Komunikasi

Guna mendapat kesuksesan dalam implementasi kebijakan, penyelenggara harus tau apa yang harus dilaksanakannya berhubungan dengan pengimplementasian sebuah kebijakan. Lebih lanjut, target kebijakan juga harus diberitahukan tentang target dan tujuan kebijakan itu sendiri. Hal tersebut penting agar terhindar dari adanya kekuasaan target kelompok.

b) Sumber Daya

Selain ditentukan oleh informasi yang jelas, kesuksesan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sumber daya yang implementor punya. Jika sumber daya tidak optimal, pastinya implementasi kebijakan tidak akan berlangsung dengan baik. Sebagai pendorong implementasi kebijakan, sumber daya bisa berupa kompetensi implementor, sumber daya finansial, dan lainnya.

c) Disposisi

Disposisi disini yang dimaksud merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, meliputi: kejujuran, tanggung jawab, sifat kerakyatan, dan sebagainya. Disposisi yang implementator punya menjadi salah satu variabel fundamental dalam pengimplementasian kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah susunan organisasi yang berfungsi mengimplementasikan kebijakan dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Guna mendorong kesuksesan implementasi kebijakan dibutuhkan suatu standar operasional prosedur (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP

dibutuhkan sebagai petunjuk fungsional oleh implementor dalam mengimplementasikan kebijakan.¹¹

Sebenarnya implementasi kebijakan bukan hanya melibatkan sikap badan-badan administratif yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program serta mengakibatkan kepatuhan pada diri kelompok target, tapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial secara langsung maupun tidak langsung bisa berpengaruh terhadap perilaku dari *stakeholder* terkait, dan hingga akhirnya mempengaruhi dampak, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan.¹²

2. Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Implementasi yang tidak berhasil atau kegagalan implementasi tersebut biasanya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

- a) Kurangnya informasi yang menyebabkan adanya deskripsi yang tidak tepat terhadap objek kebijakan ataupun terhadap para pelaksana dan isi kebijakan yang akan diimplementasikan dan hasil-hasil kebijakan tersebut.
- b) Isi kebijakan implementasi kebijakan bisa gagal dikarenakan isinya masih banyak yang samar atau tidak tepatnya atau tidak tegasnya intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri yang memperlihatkan kekurangan yang sangat berarti atau terdapat kekurangan yang berkaitan dengan sumber daya pembantu.
- c) Sulitnya dukungan implementasi kebijakan publik jika dalam pengaplikasiannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Pembagian potensi hal tersebut terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga tentang organisasi pelaksana dalam hubungannya dengan pembedaan tugas dan wewenang.¹³

¹¹ Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 17–19.

¹² Agus Subianto, *Kebijakan Publik* (Surabaya: Brilliant, 2012), 20.

¹³ Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 23–24.

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

a. Pengertian SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah rancangan yang telah menjadi kesepakatan para pemimpin di dunia, tak terkecuali Indonesia guna menghentikan kemiskinan, menurunkan kesenjangan, dan menjaga lingkungan. SDGs bertujuan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, pembangunan berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat, pengembangan yang memelihara lingkungan hidup yang berkualitas, pembangunan yang menjamin keseimbangan, serta terwujudnya tata laksana yang bisa memelihara hidup yang berkualitas untuk generasi yang akan datang.¹⁴

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai sebuah program pembangunan berupaya mencukupi berbagai harapan yang diinginkan saat ini tanpa menurunkan kemampuan generasi berikutnya dalam mencukupi kebutuhannya.¹⁵ Program SDGs didalamnya mempunyai 17 tujuan yang bersifat universal dengan 169 sasaran yang saling berkaitan, terintegrasi satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.¹⁶ Adapun 17 tujuan SDGs tersebut meliputi:

- 1) Tidak ada kemiskinan: Menghentikan semua jenis kemiskinan di penjuru dunia.
- 2) Tidak ada kelaparan: Menghilangkan kelaparan, ketahanan pangan yang tercapai, dan pertanian yang berkesinambungan.
- 3) Kehidupan yang sehat dan sejahtera: Akses hidup sehat yang terjamin dan memajukan kemakmuran hidup seluruh orang.
- 4) Pendidikan yang berkualitas: Memeratakan kualitas Pendidikan yang terjamin dan memajukan peluang belajar bagi seluruh masyarakat, menyelenggarakan Pendidikan yang komprehensif dan berkesinambungan,

¹⁴ Reni Febriani and Suryadi Samudra, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 337–38.

¹⁵ Handrian and Andry, "Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau," 78.

¹⁶ Ula, "Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan," 59.

- dan memajukan peluang belajar selamanya untuk masyarakat.
- 5) Kesenjangan gender: Kesenjangan gender yang tercapai dan mengukuhkan peran ibu dan anak.
 - 6) Air bersih dan sanitasi yang layak: Tersedianya air bersih yang terjamin dan sanitasi yang layak untuk seluruh masyarakat.
 - 7) Energi bersih dan terjangkau: Terjaminnya akses sumber energi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
 - 8) Perkembangan ekonomi dan pekerjaan layak: Mendorong kemajuan ekonomi yang berkesinambungan dan komprehensif, serta layaknya pekerjaan untuk semua masyarakat.
 - 9) Industri, inovasi, dan infrastruktur: Menciptakan infrastruktur yang bermutu, mendukung pengembangan industri yang komprehensif dan berkesinambungan serta mendukung inovasi.
 - 10) Kesenjangan yang berkurang: Menurunkan segala bentuk ketimpangan yang ada di dunia.
 - 11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan: menciptakan perkotaan dan Kawasan manusia yang aman, inklusif, berkesinambungan, dan tangguh.
 - 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: pola konsumsi dan produksi berkesinambungan yang terjamin.
 - 13) Penanganan terhadap iklim yang berubah. Bertindak secepat mungkin dalam mengatasi iklim yang berubah serta akibat yang ditimbulkan.
 - 14) Ekosistem lautan: Menggunakan dan melestarikan semua sumber daya laut dengan berkesinambungan guna pembangunan berkelanjutan.
 - 15) Ekosistem daratan: Mengembangkan pemanfaatan berkesinambungan ekosistem daratan.
 - 16) Perdamaian keadilan dan lembaga yang tangguh: Memberdayakan masyarakat yang komprehensif dan damai bagi pembangunan berkesinambungan, mewujudkan keadilan untuk masyarakat, dan membuat akses kelembagaan yang baik, bertanggung jawab, dan menyeluruh di seluruh lapisan.

17) Kemitraan guna mencapai tujuan: Kolaborasi universal guna mewujudkan tujuan berkesinambungan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya tujuan SDGs meliputi 17 poin tersebut, dalam penelitian ini terfokus pada poin kedua tujuan SDGs yaitu meniadakan kelaparan.

3. Stunting

a. Pengertian Stunting

Stunting diartikan sebagai kondisi yang mana kurangnya tinggi atau panjang badan balita apabila dibandingkan dengan usia. Keadaan tersebut diukur dengan panjang dan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada perkembangan sejak awal kehidupan. Permasalahan stunting atau kekurangan gizi pada anak dapat menghambat pertumbuhannya, yang berdampak negatif pada keberlangsungan hidupnya seperti intelektual yang menurun, rentan terkena penyakit tidak menular, produktifitas yang menurun hingga mengakibatkan kemiskinan dan beresiko melahirkan bayi dengan bobot lahir rendah.¹⁸

Stunting merupakan persoalan gizi kurang yang diakibatkan oleh asupan nutrisi yang kurang dalam tempo yang cukup lama, hingga menyebabkan terganggunya perkembangan pada anak yaitu lebih rendahnya tinggi badan atau pendek (kerdil) dari umurnya. Disebut stunting apabila keadaan fisik seseorang berada dibawah standar berdasarkan umur dan jenis kelamin.¹⁹

Masalah stunting pada ankan diakibatkan oleh berbagai faktor seperti keadaan sosial ekonomi, nutrisi ibu

¹⁷ Adi Nawir, Syamsuddin Syamsuddin, and Jusniaty, "Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan," *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung* 1, no. 3 (2022): 8–9, <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.784>.

¹⁸ Jean Fanny Junita Timban, Ellen Grace Tangkere, and Jelly Ribka Danaly Lumingkewas, "Peran Perempuan Dalam Pencegahan Stunting Di Kecamatan Bunaken Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara," *The Studies of Social Sciences* 2, no. 1 (2019): 10, <https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26894>.

¹⁹ Puspito Panggih Rahayu et al., "Perbedaan Risiko Stunting Berdasarkan Jenis Kelamin," 2020, 135–36.

saat mengandung, bayi yang sakit, dan bayi yang kekurangan nutrisi. Pada masa yang akna datang, anak yang stunting akan memperoleh kesulitan dalam menjangkau keoptimalan pertumbuhan fisik dan kognitifnya.²⁰ Badan anak dengan kondisi yang pendek biasanya dikarenakan faktor genetik dari kedua orang tuanya, sehingga banyak masyarakat yang memaklumi dan tidak melakukan apapun guna mengatasinya. Padahal sebenarnya, faktor keturunan adalah faktor determinan kesehatan yang terkecil dalam memengaruhi jika disandingkan dengan faktor tindakan, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan fasilitas kesehatan. Dengan kata lain, sesungguhnya stunting adalah permasalahan yang dapat diatasi.²¹

b. Penyebab Stunting

Kejadian stunting diakibatkan oleh faktor multi dimensi serta bukan hanya diakibatkan oleh faktor gizi yang buruk yang dihadapi oleh ibu mengandung maupun balita.²² Di bawah ini merupakan berbagai faktor yang menyebabkan stunting adalah:

1) Faktor keturunan

Faktor keturunan atau genetik adalah faktor yang tidak bisa berubah. Hal tersebut diartikan apabila ayah berperawakan pendek sebab gen-gen yang dimiliki ayah akan mewariskan sifat pendek kepada keturunannya, sehingga kejadian stunting yang terjadi pada anak susah untuk dicegah.

2) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dalam hal ini berarti rendahnya daya beli hingga kemampuan dalam membeli untuk memenuhi makanan yang bernutrisi juga kurang maksimal. Kurangnya mutu dan jumlah makanan yang

²⁰ Suarnianti, "Faktor Risiko Stunting: Literatur Review," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 15, no. 2 (2020): 144.

²¹ Dedi Joko Hermawan and Hermanto Hermanto, "Pentingnya Pola Asuh Anak Dalam Pebaikan Gizi Untuk Mencegah Stunting Sejak Dini Di Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Abdi Panca Mara* 1, no. 1 (2020): 6, <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v1i1.636>.

²² Rayhan Bakhrul Ulum et al., "Implementasi Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Sebagai Upaya Penanggulangan Stunting," *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)* 4, no. 2 (2023): 97, <https://doi.org/10.18860/jrce.v4i2.19871>.

bernutrisi mengakibatkan tidak terpenuhinya gizi pada anak, padahal anak membutuhkan nutrisi lengkap dalam tumbuh kembangnya.

3) Jeda Kelahiran

Jeda antara kelahiran yang kurang dari dua tahun mengakibatkan salah satu anak terlebih yang lahir dulu tidak memperoleh ASI yang cukup, sebab ASI dipentingkan untuk anak yang baru lahir. Oleh karena itu, anak akan mengalami kekurangan nutrisi sehingga menjadi stunting.

4) Anemia pada Ibu Hamil

Anemia yang dialami ibu hamil kebanyakan diakibatkan oleh zat besi yang kurang, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan janin yang akan dilahirkan telah kekurangan gizi. Kekurangan nutrisi pada bayi bila tidak secepatnya dicegah akan mengakibatkan stunting pada balita.

5) Sanitasi Lingkungan

Kurang memadainya sanitasi, rendahnya kualitas bahan bakar memasak, serta tidak memadainya pengelolaan limbah rumah tangga bisa meningkatkan risiko kekerdilan anak karena buruknya keadaan sanitasi akan berpengaruh terhadap kesehatan.²³

c. Ciri-Ciri Stunting pada Anak

Menurut Kemenkes RI, anak dapat dikatakan stunting jika telah diukur tinggi atau panjang badannya, kemudian dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukuran tersebut ada pada taksiran di bawah standar. Selain badan yang pendek dari anak seumurannya, terdapat ciri-ciri lain seperti:

- a. Perkembangannya yang lambat
- b. Wajah terlihat lebih muda dari anak seumurannya
- c. Terlambatnya pertumbuhan gigi
- d. Buruknya performa pada daya fokus dan memori belajarnya
- e. Umur 8-10 tahun anak menjadi lebih banyak diam, sedikit melakukan kontak mata pada orang di sekelilingnya

²³ Aryu Candra, *Epidemiologi Stunting* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), 15–22.

- f. Berat badan balita tidak naik malahan cenderung menurun
- g. Terhambatnya pertumbuhan tubuh anak, seperti telat menstruasi pertama anak perempuan
- h. Penyakit infeksi lebih mudah menyerang anak.²⁴

d. Dampak Stunting

Stunting pada balita bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, yakni keadaan sosial ekonomi, nutrisi ibu saat mengandung, bayi yang mengalami sakit, dan bayi yang kekurangan asupan nutrisi. Pada dasarnya, berbagai pemicu tersebut terjadi dalam kurun waktu yang lama. Stunting pantas memperoleh pandangan lebih sebab bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup anak hingga dewasa, utamanya pertumbuhan fisik dan kognitif yang terganggu jika tidak secepatnya diatasi dengan baik. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh stunting yaitu dampak jangka pendek dan jangka Panjang. Dalam jangka pendek, dampak stunting yaitu pertumbuhan otak yang terganggu, kecerdasan, perkembangan fisik yang terganggu, dan gangguan metabolisme. Jangka panjangnya, dampak stunting yang tidak diatasi dengan baik maka akan:

- a. Pertumbuhan kognitif otak anak yang menurun
- b. Mudah sakit karena lemahnya kekebalan tubuh
- c. Risiko tinggi timbulnya penyakit metabolik seperti obesitas
- d. Penyakit jantung
- e. Penyakit pembuluh darah
- f. Sulitnya kemampuan belajar.²⁵

Selain itu, dampak stunting yang ditimbulkan juga sangat kompleks bagi perekonomian, diantaranya yakni produktivitas yang turun, beban biaya kesehatan serta kemiskinan.

- a. Produktivitas tenaga kerja yang kurang

²⁴ Evy Noorhasanah, Nor Isna Tauhidah, and Musphyanti Chalida Putri, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tatah Makmur Kabupaten Banjar," *Journal of Midwifery and Reproduction* 4, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.35747/jmr.v4i1.559>.

²⁵ Nur Oktia Nirmalasari, "Stunting Pada Anak : Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>.

Anak-anak yang mempunyai masalah stunting akan mengganggu perkembangan dan kognitifnya, sehingga produktivitas mereka saat dewasa akan berkurang serta potensi intelektual yang dimilikinya terbatas. Hal tersebut tentunya bisa menurunkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di suatu negara dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

b. **Beban perawatan kesehatan**

Stunting bisa menyebabkan naiknya biaya perawatan kesehatan yang ditanggung dalam waktu yang lama, baik itu individu yang mengalami stunting ataupun semua sistem kesehatan dikarenakan perawatan serta pengobatan bagi anak-anak stunting membutuhkan biaya besar yang harus dikeluarkan.

c. **Kemiskinan siklus generasi**

Anak-anak yang mengalami stunting bisa mengakibatkan siklus kemiskinan antar generasi, dikarenakan anak yang stunting tersebut kemungkinan akan condong mempunyai kesempatan terbatas dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan, siklus kemiskinan yang akan bertahan dalam suatu keluarga, dan perekonomian dalam suatu masyarakat akan terhambat.²⁶

e. **Intervensi Penanggulangan Stunting**

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, penanggulangan asal katanya dari “tanggulang” yang artinya menghadapi, mengatasi. Selanjutnya ditambahkan dengan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang artinya proses, cara, perbuatan penaggulangan perbuatan menanggulangi.²⁷ Penanggulangan yaitu cara atau proses dalam mengatasi sesuatu yang dipandang sebagai masalah. Penanggulangan stunting adalah sasaran dari SDGs program kedua menghilangkan kelaparan (*Zero Hunger*), yakni ketahanan pangan yang tercapai, perbaikan nutrisi, dan mendukung keberlanjutan pertanian.

Pemerintah dalam melakukan penanggulangan stunting yaitu melalui intervensi sensitif dan intervensi

²⁶ Rully Angraeni Safitri, Dewi Puspitasari, and Fajar Ramadhan Saputra, “Dampak Lingkungan Stunting Dan Perekonomian,” 136.

²⁷ KBBI Daring, “Penanggulangan,” 2023, <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

spesifik. Intervensi sensitif adalah intervensi yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, sedangkan intervensi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung.

1. Intervensi Sensitif

Target dalam intervensi sensitif lebih lebar meliputi masyarakat umum. Intervensi sensitif sifatnya makro, lintas kementerian, lembaga dan berjangka panjang. Berikut adalah upaya penanggulangan stunting yang dilakukan melalui intervensi sensitif yaitu:

- a. Akses masyarakat terhadap air bersih lebih ditingkatkan
- b. Peningkatan fasilitas sanitasi yang layak
- c. Memberikan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)
- d. Mengadakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- e. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
- f. Mengadakan pendidikan pengasuhan dan gizi pada orang tua serta masyarakat
- g. Menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- h. Sinkronisasi Batasan umur perkawinan antara kementerian kesehatan, agama, kementerian dalam negeri, alim ulama dan terkait
- i. Melakukan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja
- j. Memberikan jaminan dan bantuan sosial bagi keluarga yang tidak mampu
- k. Memajukan ketahanan pangan dan nutrisi
- l. Menggerakan ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kursus-kursus ketrampilan untuk meminimalisir kemiskinan serta menumbuhkan kemampuan ekonomi rumah tangga
- m. Melakukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- n. Potensi lokal lebih digali guna meningkatkan penghasilan daerah
- o. Menjamin nilai tukar yang bermanfaat bagi petani

- p. Melaksanakan sosialisasi mengenai PHBS dan gizi seimbang pada guru PAUD/ SD/SMP/SMA dan jurnalis
 - q. Memberikan pengetahuan terkait gizi dan kesehatan pada calon pengantin
2. Intervensi Spesifik
- Target utama dari intervensi spesifik yakni anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), intervensi ini sifatnya adalah jangka pendek. Intervensi spesifik dilakukan melalui berikut ini:
- a. Intervensi spesifik yang dilakukan dengan target ibu mengandung adalah meliputi:
 - 1) Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu mengandung guna mencegah kurangnya energi dan protein yang kronis
 - 2) Mencegah zat besi dan asam folat yang kurang
 - 3) Mencegah kekurangan iodium
 - 4) Mengatasi kecacingan pada ibu mengandung
 - 5) Menjaga ibu mengandung dari malaria
 - 6) Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang gizi
 - b. Intervensi spesifik dengan target ibu menyusui dan anak umur 0-6 bulan, meliputi:
 - 1) Melaksanakan inisiasi menyusui dini/IMD
 - 2) Mendukung pemberian kolostrum
 - 3) Mendukung dalam memberikan ASI Eksklusif
 - 4) Pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang gizi
 - c. Intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak umur 7-23 bulan, terdapat program:
 - 1) Memberikan pengetahuan agar selalu memberikan ASI sampai 2 tahun
 - 2) Edukasi ibu dalam pemberian asupan pendamping MP-ASI dengan tepat sesuai prinsip nutrisi seimbang
 - 3) Memberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang gizi
 - 4) Memberikan obat cacing pada anak disesuaikan dengan kebutuhan

- 5) Suplementasi *zinc*
- 6) Fortifikasi zat besi pada makanan
- 7) Suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai program
- 8) Mengatasi malaria
- 9) Mengadakan imunisasi lengkap
- 10) Melaksanakan penanggulangan serta pengobatan diare.²⁸

4. Strategi

a. Pengertian Strategi

Definisi strategi adalah suatu proses penetapan susunan para pemimpin puncak yang bersentral terhadap tujuan jangka panjang organisasi, disertakan perumusan sebuah metode tentang bagaimana supaya tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Strategi merupakan rancangan jangka panjang yang disertai tindakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya yang didasarkan analisis dan pemantauan lingkungan.²⁹

Strategi adalah cara terbaik dalam menggapai tujuan organisasi. Strategi diperlukan setiap waktu ketika terdapat kompetisi, hal tersebut akan dimenangkan oleh organisasi yang mempunyai sebuah cara strategis.³⁰ Strategi adalah rencana dalam menggapai suatu tujuan. Akan tetapi dalam menggapai tujuan, strategi juga perlu menunjukkan bagaimana menjalankan operasi yang diperlukan untuk mencapainya.³¹

Pada dasarnya strategi dirancang guna menjawab setiap perubahan yang terjadi dari sebuah organisasi. Perubahan itu pastinya akan terjawab dengan mengamati kemampuan dalam organisasi. Hingga sejauh mana sebuah organisasi bisa menggunakan kesempatan dan meminimalisir bahaya dari luar guna mendapatkan manfaat

²⁸ Tri Siswati, *Stunting* (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), 79–81.

²⁹ Mimin Yatminiwati, *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa* (Lumajang: Widya Gama Press, 2019), 3.

³⁰ Normaisa, Mahsyar, and Sudarmi, "Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang," *Journal Unismuh* 1, no. 3 (2021): 908.

³¹ Shafira Azahra, Hana Hana, and Ninuk Arifiyani, "Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Stunting," *JRP: Jurnal Relasi Publik* 1, no. 1 (2023): 4.

yang optimal dengan keunggulan yang dipunyai oleh organisasi saat ini.³²

5. Stunting dalam Pandangan Islam

Stunting merupakan kasus gizi kurang yang diakibatkan oleh kekurangan asupan nutrisi dalam kurun waktu yang lama sebab dalam pemberian asupannya tidak seimbang dengan kebutuhan nutrisinya. Terjadinya stunting dimulai dari janin saat masih dalam kandungan dan akan terlihat saat anak berumur dua tahun. Kurangnya nutrisi pada umur dini dapat menambah tingkat kematian bayi dan anak, penderitanya akan gampang sakit dan mempunyai postur badan kurang bagus ketika dewasa.³³

Bahaya yang terjadi ketika mengalami stunting, bukan hanya kurangnya tinggi tubuh, namun yang paling berbahaya yaitu kemampuan belajar anak yang rendah, keterbelakangan, dan penyakit-penyakit kronis yang mudah menyerang tubuh anak, kerja otak hingga kemampuan kognitifnya bisa menurun, lambatnya cara berpikir serta sulit maju.³⁴

Dalam pandangan Al-Qur'an dan Al-Hadits, guna menciptakan generasi yang bermutu, tangguh, sehat jasmani dan rohani, maksimal dalam bertumbuh dengan salah satu indikatornya tidak terjadi stunting, adalah kewajiban agama dan pengaktualan dari hukum Allah dalam Al Qur'an. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.³⁵

Peranan orang tua sangat penting dalam upaya pencegahan stunting sebagai perwujudan menjaga jiwa anak.

³² Abd Rahman Rahim and Enny Radjab, *Manajemen Strategi* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 2.

³³ Kinanti Rahmadhita, “Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 226, <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>.

³⁴ Handayani, “Selamatkan Generasi Bangsa Dari Bahaya Stunting,” 88.

³⁵ Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag.”

Islam memandang permasalahan stunting pada anak dikarenakan lemahnya generasi yang diciptakan, padahal Islam memerintahkan untuk mewujudkan generasi yang kuat. Pertumbuhan dan perkembangan generasi yang lemah tersebut dapat menghambat produktivitas sumber daya manusia. Wajib bagi orang tua untuk memberikan hak anaknya dengan pola asuh yang baik berdasarkan pengetahuan supaya bahaya atau penyakit dapat terhindar. Hal itu juga termasuk ke dalam maqashid syariah yakni berbagai hal yang menjadi tujuan utama dalam berdirinya syariat, seperti melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, melindungi generasi seterusnya. Selanjutnya, salah satu penanggulangan stunting termasuk menjaga jiwa yang ada dalam maqashid syariah, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, dan melindungi generasi seterusnya.³⁶

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, *“Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan dalam masing-masing ada kebaikan”* (HR Muslim). Para ulama memaparkan tentang maksud kuat dalam hal ini meliputi iman, pengetahuan, fisik, mental dan juga material. Kekuatan itu akan membuat seseorang dapat semaksimal mungkin menunaikan kewajibannya kepada Allah dan membawa manfaat terhadap sesama manusia dan alam semesta. Kesimpulannya, penanggulangan stunting adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun generasi yang dicerminkan oleh Al-Qur’an dan Hadis, yakni generasi saleh yang kuat iman, pengetahuan, fisik, mental dan material sehingga harapannya bisa menjadi pemimpin di bumi ini.

Anak dalam pandangan Islam dianggap sebagai anugrah yang berstatus suci. Anugrah ini merupakan kepercayaan yang harus dipelihara serta dijaga oleh orang tua, sebab anak sebagai suatu hal yang berharga bagi orang tua dan negara. Islam sudah memberikan perhatian lebih pada pertumbuhan anak. Penjagaan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan sebagainya. Kebutuhan sandang pangan seorang anak harus dipenuhi oleh orang tuanya sehingga anak tumbuh sehat. Khususnya, orang tua harus mencermati perkembangan seorang anak, tidak boleh hingga sakit-sakitan, kurangnya asupan nutrisi

³⁶ Setyowati, “Hubungan Pola Asuh Ibu Dan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan Di Pandeglang, Banten Dan Tinjauan Menurut Pandangan Islam,” 947–48.

hingga menjadi stunting, kurang sempurna pertumbuhan fisiknya, serta menjadi generasi yang tidak kuat.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Hadi Supriyanto (2023)	Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes	<p>Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi penurunan stunting di Kecamatan Salem masih belum maksimal dikarenakan strategi yang dipakai oleh pelaksana masih belum maksimal, dan faktor sosial ekonomi juga menjadi kendala dalam pengimplementasian penurunan stunting di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.</p> <p>Persamaan dengan penelitian ini adalah kedua penelitian memiliki fokus utama pada upaya penurunan kasus stunting.</p> <p>Sedangkan perbedaannya pada fokus objek penelitian di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kudus yang mungkin berbeda dalam hal demografi, budaya, dan</p>

³⁷ Endang Wahyuningsih and Syahbana Dauly, "Pendampingan Keluarga Dalam Pencegahan Anak Stunting Dengan Perspektif Islam Dan Kesehatan," *Urecol Journal Part F: Community Development* 1, no. 1 (2021): 34.

			<p>kondisi sosial ekonomi, sehingga bisa berpengaruh terhadap strategi implementasi dan dampak kebijakan yang dilaksanakan. Penelitian pertama lebih terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan atau program yang diterapkan di Kecamatan Salem untuk menurunkan stunting. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis lebih umum membahas bagaimana Kabupaten Kudus mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam upaya penanggulangan stunting.</p>
2.	<p>Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri (2021)</p>	<p>Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) Pada Kasus Stunting di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian tersebut yakni kolaborasi antara aktor negara dan aktor non negara sangat diperlukan dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia. Diawali dengan sinergisitas antar kementerian atau lembaga dan kolaborasi dengan akademisi, para sarjana kesehatan masyarakat, perusahaan, serta pihak asing. Hal tersebut menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan mempunyai kedudukan</p>

		<p>dalam mengurangi masalah stunting.</p> <p>Persamaan penelitian dengan penulis adalah mendeskripsikan tentang berbagai upaya mengatasi masalah stunting dalam mencapai tujuan kedua SDGs.</p> <p>Perbedaanya terletak pada fokus spesifik penelitian, objek penelitian, dan metode pengumpulan data yang dilaksanakan. Dalam penelitian pertama fokus penelitian terletak pada peran dari berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menangani kasus stunting di Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji sejauh mana program SDGs sudah diimplementasikan dalam menanggulangi kasus stunting di Kabupaten Kudus. Lebih lanjut, penelitian pertama dalam pengumpulan datanya dilakukan menggunakan studi literatur, sedangkan pada penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi lapangan.</p>
--	--	---

<p>3.</p>	<p>Sri Handayani, dkk (2023)</p>	<p>Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)</p>	<p>Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa lembaga pemerintah di Desa Tambakasri telah mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yang dinaungi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga lembaga pemerintah desa bisa diketahui sudah melakukan pilar regulatif dari institusi pemerintah desa. Persamaan penelitian dengan penulis adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga mendeskripsikan tentang program yang dicapai dalam mengatasi masalah stunting melibatkan sumber daya seperti peran pemerintah atau pemangku kepentingan dalam pengimplementasiannya. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah pada fokus spesifik penelitiannya dan objek penelitian. Penelitian pertama berfokus pada peran lembaga pemerintah desa dalam mencapai tujuan kedua SDGs untuk</p>
-----------	----------------------------------	--	---

			<p>mencegah stunting di Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penelitian tersebut mengkaji sejauh mana lembaga pemerintah desa telah mengimplementasikan SDGs dalam mengatasi kasus stunting yang dinaungi oleh Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Di sisi lain, penelitian ini fokus pada implementasi SDGs dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Kudus.</p>
4.	Tri Nur Azidah dan Isna Fitria Agustina (2023)	Peran Desa dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SDGs Desa Sukodono	<p>Hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Sukodono terdapat empat indikator yakni ketersediaan sarana dan prasarana dimana pemerintah desa sudah berupaya menyediakan alat posyandu. Kedua ketersediaan anggaran dimana pemerintah Desa Sukodono telah menganggarkan sebesar 60.000.000 untuk program stunting. Ketiga kemitraan dimana terdapat tiga pihak yang berperan yaitu</p>

			<p>Pemerintah Desa, Petugas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Terakhir adalah partisipasi masyarakat dimana masyarakat Desa Sukodono mendukung penuh terhadap penurunan tingkat stunting.</p> <p>Persamaan kedua penelitian memiliki fokus utama pada permasalahan stunting dan bagaimana Desa Sukodono (penelitian pertama) serta Kabupaten Kudus (penelitian kedua) mengimplementasikan program SDGs untuk menanggulangi stunting. Perbedaannya adalah, penelitian pertama fokus pada Desa Sukodono sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian kedua mengambil Kabupaten Kudus sebagai objek penelitian. Penelitian pertama lebih terfokus pada peran spesifik desa (Desa Sukodono), sementara penelitian kedua mengevaluasi implementasi program SDGs di tingkat kabupaten (Kabupaten Kudus).</p>
<p>5.</p>	<p>Desy Dwi Anjarwati,</p>	<p>Kajian Implementasi</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah stunting sulit diturunkan</p>

	<p>Hary Priyanto, dan Niko Pahlevi Hentika (2023)</p>	<p>Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono</p>	<p>dikarenakan program pencegahannya yang tidak efektif, koordinasi tentang perencanaan yang kurang maksimal, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, pengalokasian sumber daya yang tidak efektif dan efisien, serta sosialisasi dan pendampingan yang minim terkait penanganan dan pencegahan stunting. Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama-sama mendeskripsikan mengenai program penanganan masalah stunting. Adapun perbedaannya, penelitian pertama berfokus pada Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian kedua fokus objek penelitiannya di Kabupaten Kudus. Perbedaan ini mencakup konteks geografis, sosial, dan budaya sehingga bisa memengaruhi implementasi program penanggulangan stunting. Selanjutnya, penelitian pertama mengevaluasi implementasi program</p>
--	---	--	--

			<p>kesehatan masyarakat khususnya dalam menanggulangi stunting, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting.</p>
6.	<p>Sri Hajjah Purba (2019)</p>	<p>Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat</p>	<p>Adapun hasil penelitian analisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Secanggang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting telah terlaksana dengan baik yang mengacu pada peraturan daerah Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, namun dalam mensosialisasikan ke masyarakat belum optimal sehingga ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang penanggulangan stunting. Persamaan penelitian dengan penulis adalah mendeskripsikan tentang pengimplementasian kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah stunting. Adapun perbedaan penelitiannya adalah pada fokus penelitian, objek</p>

			<p>penelitian, dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, sedangkan pada penelitian ini mengkaji sejauh mana program SDGs sudah diimplementasikan dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Kudus. Metode penelitian pertama menggunakan <i>mix method</i>, sedangkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif digunakan oleh penulis.</p>
7.	<p>Maysara Edriani dan Rapotan Hasibuan (2023)</p>	<p>Implementasi Kebijakan dalam Percepatan Penurunan Stunting di UPT Puskesmas Terjun Kota Medan</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di UPT. Puskesmas Terjun sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2020 tentang penurunan stunting. Namun masih terdapat kendala dari sumber daya, sarana dan prasarana serta lingkungan dalam kebijakan tersebut sehingga menjadikan pelaksanaannya tidak</p>

			<p>berjalan maksimal.</p> <p>Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama-sama menjelaskan upaya penanganan masalah stunting.</p> <p>Sedangkan perbedaannya, penelitian pertama objek penelitiannya berfokus pada puskesmas di Kota Medan, sedangkan penelitian kedua yaitu di Kabupaten Kudus. Hal ini menciptakan perbedaan dalam pengimplementasian program, tantangan, kesuksesan program, dan hasil yang dicapai. Kemudian, penelitian pertama membahas kebijakan atau program yang lebih spesifik terkait "Percepatan Penurunan Stunting" di UPT Puskesmas Terjun, sedangkan penelitian kedua membahas implementasi SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus.</p>
--	--	--	--

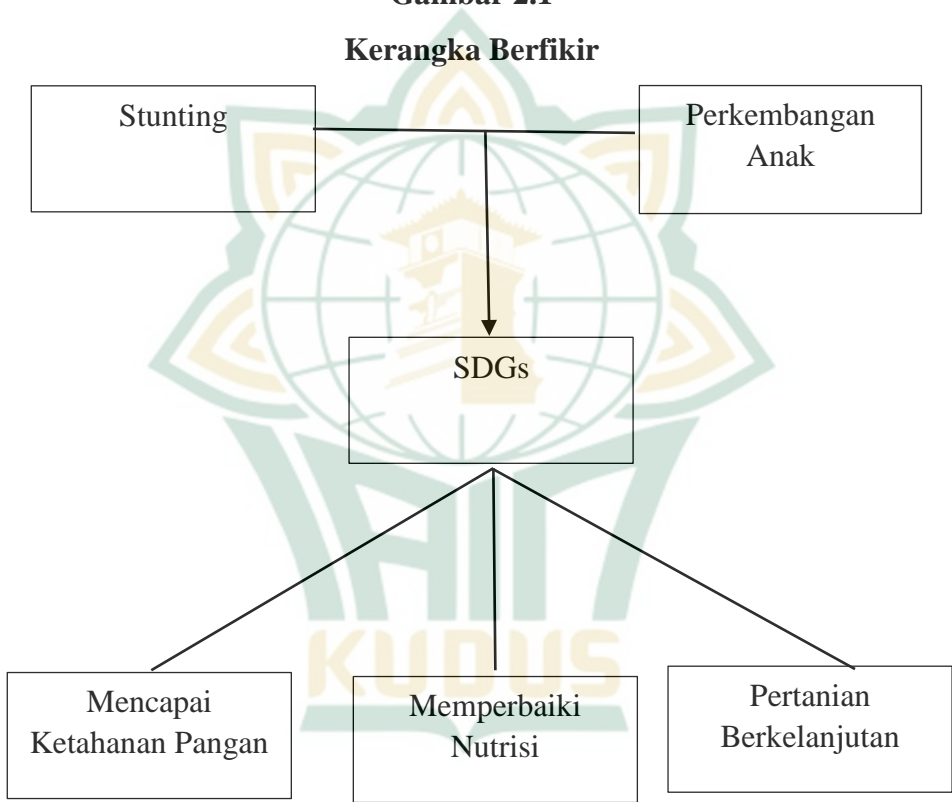
Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah bagian dari penelitian yang mendeskripsikan alur berfikir peneliti, dalam memberikan penjelasan pada orang lain mengapa mempunyai persepsi yang

dijelaskan tersebut. Kerangka berpikir adalah model konseptual terkait bagaimana hubungan beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebagai suatu masalah yang penting.³⁸ Maka kerangka pemikiran yang digunakan untuk menyusun tahapan penelitian dalam mengimplementasikan program SDGs sebagai upaya penanggulangan kasus stunting di Kabupaten Kudus dapat kita lihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Wawancara Penelitian

Berikut adalah pertanyaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi tentang “Implementasi Kebijakan SDGs dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus”:

1. Bagaimana mengkomunikasikan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus?

³⁸ Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 71.

2. Apakah anda sudah memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting?
3. Dari mana memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting?
4. Bagaimana upaya pengkomunikasian yang dilakukan dalam mencapai tujuan penanggulangan stunting? Sejauh mana upaya tersebut dijalankan dengan jelas dan efisien?
5. Apakah upaya pengkomunikasian yang dilakukan oleh pemangku kebijakan penanggulangan stunting dilakukan dengan jelas?
6. Bagaimana menjaga keberlanjutan pengkomunikasian implementasi kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting?
7. Bagaimana kualitas dan kuantitas staf untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting kepada masyarakat? Apakah sudah memadai?
8. Apa saja informasi yang dianggap relevan dan diperlukan oleh staf terkait proses implementasi kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting?
9. Bagaimana wewenang pemangku kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan SDGs untuk menanggulangi stunting?
10. Bagaimana fasilitas maupun anggaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting? Apakah sudah memadai?
11. Bagaimana pendapat anda terkait fasilitas dalam penanggulangan stunting? Apakah memadai?
12. Apakah terdapat sikap negatif dari suatu sektoral untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting?
13. Bagaimana para pemangku kebijakan melaksanakan kebijakan penanggulangan stunting?
14. Apakah terdapat kriteria khusus yang diterapkan dalam penetapan staf yang terlibat untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting?
15. Apa saja faktor pendorong dalam mengimplementasikan kebijakan SDGs terkait penanggulangan stunting?
16. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan SDGs terkait penanggulangan stunting?
17. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting?
18. Apakah terdapat SOP (Standar Operasional Porsedur) untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting? Jika ada apakah sudah efektif?

19. Bagaimana dampak stunting bagi perekonomian?
20. Hal apa yang perlu ditingkatkan atau diubah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait penanggulangan stunting agar lebih efektif?

